

**PERAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN *SKRINING*
HIPOTIROID KONGENITAL UNTUK MENJAMIN KESEHATAN ANAK
DI PUSKESMAS KABUPATEN OKU TIMUR**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Ilmu Hukum
Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsetrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
Charunia Anggraini
NIM 15.C2.0016

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2017

TESIS

**PERAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN *SKRINNING*
HIPOTIROID KONGENITAL UNTUK MENJAMIN KESEHATAN
DI PUSKESMAS KABUPATEN OKU TIMUR**

diajukan oleh
Charunia Anggraini
NIM 15.C2.0016

telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Y Budi Sarwo.,SH.MH

tanggal.....

Pembimbing Pendamping

Dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD.,MH.Kes.,FINASIM

tanggal.....

TESIS

PERAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN *SKRINNING* *HIPOTIROID KONGENITAL* UNTUK MENJAMIN KESEHATAN ANAK DI PUSKESMAS KABUPATEN OKU TIMUR

Yang Dipersiapkan dan disusun oleh

Charunia Anggraini

NIM 15.C2.0016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal.....

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Dr. Y Budi Sarwo.,SH.MH

Yovita Indrayati, SH.,M.Hum,

Pembimbing Pendamping

Dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD.,MH.Kes.,FINASIM

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, Alhamdulillah atas berkah dan rahmat-Nya yang memberi ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang yang berjudul “Peran Puskesmas dalam Pelaksanaan *Skrinning Hipotiroid Kongenital* Untuk Menjamin Kesehatan Anak Di Kabupaten Di Puskesmas Kabupten Oku Timur”.

Kebijakan merupakan yang dibuat oleh badan pemerintah. Kebijakan publik menjadi suatu pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten OKU Timur memilih untuk melaksanakan SHK di kabupaten OKU Timur dengan memiliki kebijakan yang di atur dalam peraturan daerah kabupaten OKU Timur. Adapun kewenangan kabupaten OKU Timur ialah secara atributif melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan delegasi pemerintah kabupaten dapat dengan leluasa mengatur daerahnya serta bertanggung jawab dengan penyelenggaraan yang diselenggarakan di kabupaten OKU Timur. Pentingnya penelitian ini selain mengetahui tentang dasar hukum yang mengatur tentang program SHK, adapun yang lain ialah penyakit *Hipotiroid Kongenital* merupakan penyakit akibat pertumbuhan kelenjar tiroid yang tidak sempurna, bayi baru lahir dapat mengalami Hipotiroid. Apabila tidak diobati dengan benar, tumbuh kembang si bayi akan terganggu. Bukan hanya pertumbuhan fisik namun keadaan mental pun

menjadi terbelakang. Dengan begitu adanya skrinning Hipotiroid Kongenital ini dapat membantu untuk mendeteksi sedini mungkin gangguan kongenital yang terjadi pada setiap bayi baru lahir, ini merupakan salah satu program pemerintah yang diatur didalam Permenkes No. 78 tahun 2014 tentang Skrinning Hipotiroid Kongenital sebagai upaya menjamin kesehatan anak.

Penyusunan tesis penelitian ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Y. Budi Winiarko, M.SC., selaku Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar pada Program Studi Magister Hukum Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Ir. Lindayani, MP selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr A. Widanti S, SH, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
4. Dr. Y Budi Sarwo.,SH.MH, selaku Pembimbing I dan penguji yang telah memberikan bimbingan selama menyusun tesis ini.
5. Dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD.,MH.Kes.,FINASIM, selaku Pembimbing II dan penguji yang telah memberikan bimbingan selama menyusun tesis ini.
6. Yovita Indrayati, SH.,M.Hum, selaku Penguji yang telah memberikan masukan dalam tesis ini.

7. Kepala bagian Promosi Kesehatan beserta jajarannya di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur yang telah memberikan data dalam penelitian tesis ini.
8. Kepala Puskesmas Martapura beserta jajarannya, yang telah bersedia menjadi tempat penelitian sekaligus bersedia memberikan informasi dalam penelitian tesis ini.
9. Kepala Puskesmas Kota Baru beserta jajarannya, yang telah bersedia menjadi tempat penelitian sekaligus bersedia memberikan informasi dalam penelitian tesis ini.
10. Kepala Puskesmas Bunga Mayang beserta jajarannya, yang telah bersedia menjadi tempat penelitian sekaligus bersedia memberikan informasi dalam penelitian tesis ini.
11. Kepala Puskesmas Rawa Bening beserta jajarannya, yang telah bersedia menjadi tempat penelitian sekaligus bersedia memberikan informasi dalam penelitian tesis ini.
12. Kepala Puskesmas Nusa Bakti beserta jajarannya, yang telah bersedia menjadi tempat penelitian sekaligus bersedia memberikan informasi dalam penelitian tesis ini.
13. Kepada bagian Hukum Kabupaten OKU Timur beserta jajarannya, yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
14. Semua staf sekretariat pascasarjana beserta jajarannya yang membantu dalam dalam proses penyusunan tesis ini.

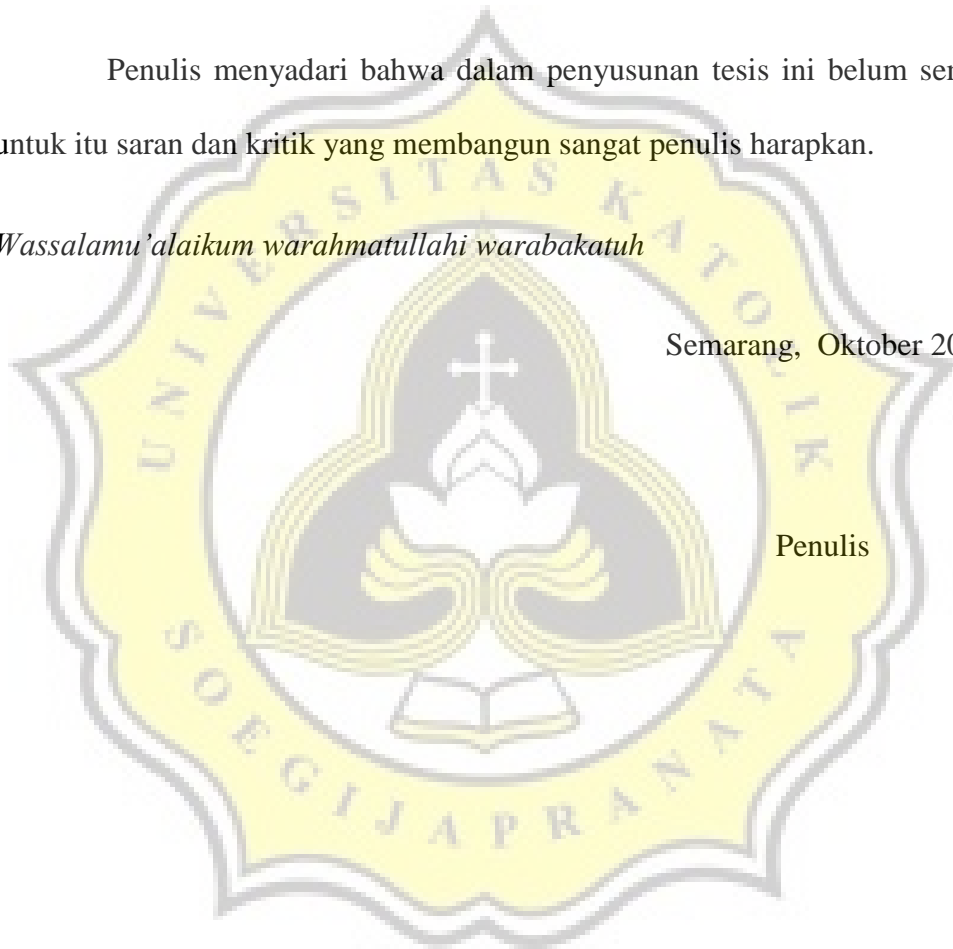
15. Orangtua saya bapak suripto dan ibu Rusmini yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulisan tesis ini hingga dapat terselesaikan.
16. Semua teman seperjuangan Angkatan 23 Hukum Kesehatan yang telah menjadi keluarga baru dan selalu memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi warabakatuh

Semarang, Oktober 2017

Penulis



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Kerangka Konsep.....	12
6. Metode penelitian	13
a. Metode Pendekatan	13
b. Spesifikasi Penelitian.....	13
c. Variabel dan Definisi Operasional	14
d. Jenis Data	14
e. Metode pengumpulan data	18
f. Metode analisis data	20
g. Penyajian tesis.....	22
h. Jadwal penelitian.....	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 25
1. Kebijakan.....	25
a. Pengertian Kebijakan	25
b. Implementasi Kebijakan	27
2. Kewenangan	28
a. Pengertian Kewenangan.....	28
b. Sumber Kewenangan	29
3. Peran	30
4. Upaya Kesehatan	31

5. Hak Asasi Manusia (HAM)	34
6. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam upaya kesehatan	34
7. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	37
a. Pengertian	37
b. Tujuan	40
8. <i>Skrinning</i>	43
a. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan	44
b. Komunikasi, informasi dan edukasi	45
c. Pengambil kebijakan	47
d. Proses skrinning	47
9. <i>Hipotiroid Kongenital</i>	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum	55
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur dalam Mendukung Peran Puskesmas untuk pelaksanaan <i>Skrinning Hipotiroid Kongenital</i> (SHK)	59
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan <i>Skrinning Hipotiroid Kongenital</i> (SHK)	87
a. Faktor Yuridis	87
b. Faktor Internal	89
c. Faktor Eksternal	91
BAB IV PENUTUP	96
1. Kesimpulan	96
2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil penelitian 5 Puskesmas	93
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan kepada Puskesmas

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan kepada Dinas kesehatan

Lampiran 3 Daftar pertanyaan kepada bagian Hukum Pemerintah Daerah
Kabupaten OKU Timur

Lampiran 4 Daftar pertanyaan kepada ibu yang memiliki bayi

Lampiran 5 *Standar Operational Proccedure (SOP) Skrinning Hipotiroid
Kongenital (SHK)*

Lampiran 6 Surat Ijin Pendahuluan

Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 8 Lampiran Permohonan Menjadi Responden

Lampiran 9 Persetujuan Responden Puskesmas Martapura

Lampiran 10 Persetujuan Responden Puskesmas Bunga Mayang

Lampiran 11 Persetujuan Responden Puskesmas Rawa Bening

Lampiran 12 Persetujuan Responden Puskesmas Nusa Nakti

Lampiran 13 Persetujuan Responden Puskesmas Kota Baru

Lampiran 14 Persetujuan Narasumber Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur

Lampiran 15 Persetujuan Narasumber Pemerintah Daerah Bagian Hukum
Kabupaten OKU Timur

Lampiran 16 Surat Balasan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur

Lampiran 17 Surat Balasan Puskesmas Martapura

Lampiran 18 Surat Balasan Puskesmas Bunga Mayang

Lampiran 19 Surat Balasan Puskesmas Rawa Bening

Lampiran 20 Surat Balasan Puskesmas Nusa Bakti

Lampiran 21 Surat Balasan Puskesmas Kota Baru

Lampiran 22 Surat Balasan Bagian Hukum Pemerintah Daerah OKU Timur

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Charunia Anggraini, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 15. C2. 0016,

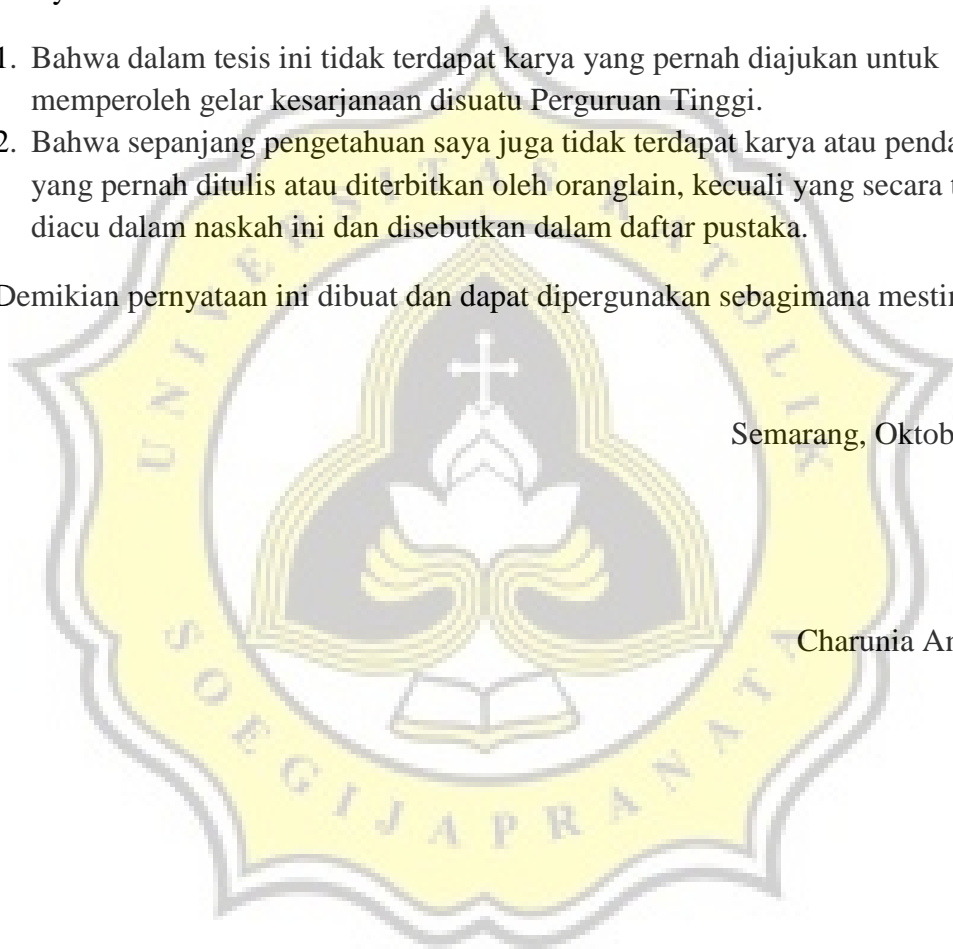
Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Oktober 2017

Charunia Anggraini



ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan. Dalam latar belakang penulisan studi pendahuluan bulan april 2017 bahwa *Skrinning Hipotiroid Kongenital* (SHK) belum dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) di Kabupaten OKU Timur. Belum ada peraturan khusus tentang SHK di Kabupaten OKU Timur. Sehingga bayi baru lahir belum dapat dilakukan SHK. SHK sebagai program nasional diperlukan kebijakan pemerintah, komitmen petugas kesehatan/profesi terkait, Integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan kabupaten OKU Timur dalam mendukung pelaksanaan *Skrinning hIpotiroid Kongenital* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari 3 Narasumber dan responden sebanyak 5 dari puskesmas. Kemudian data sekunder sebagai penunjang dengan analisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten OKU Timur belum mempunyai peraturan daerah/bupati khusus tentang program *Skrinning hIpotiroid Kongenital*. Namun bentuk dukungannya berupa kebijakan yang diatur dalam peraturan lain. Seperti Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten OKU Timur. Dan Peraturan Bupati No. 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah. Kebijakan lain Pemerintah Daerah Kab. OKU Timur tidak mempersulit dan memberikan anggaran untuk UPTD Dinas kesehatan dalam penyelenggaraan program kesehatan. Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 78 Tahun 2014 tentang *Skrinning hIpotiroid Kongenital* (SHK), sejauh penelitian dilakukan hasil dari pemeriksaan yg sudah dilakukan belum terdapat bayi positif dengan HK. Peran Puskesmas dalam pelaksanaannya menggunakan *Standart Operational Proccedure*(SOP) yang didapat dari Dinas Kesehatan kabupaten OKU Timur dimana SOP tersebut diturunkan dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Peran Puskesmas, *Skrinning, Hipotiroid Kongenital*

ABSTRACT

Health is one of human rights that should be protected and cared for by the Government. Children, as a matter of fact, are to be the generation that will hold this country in the future and that's why they should be protected. The preliminary study showed that the Congenital Hypothyroid Screening (*Skrinning Hipotiroid Kongenital*/SHK) had not been implemented in the first level health facility (Public Health Center or *Puskesmas*) at East OKU Regency. There was no specific regulation on SHK at East OKU Regency so that SHK would not be implemented to newborn babies. Since SHK was one of the national programs it required a governmental regulation, the commitment of health officer and related profession and it should be integrated with the whole health service system.

This research implemented a socio-legal approach having analytical-descriptive specification. The objective was to get an overview of the policies of East OKU regency in supporting the implementation of Congenital Hypothyroid Screening (SHK) beside to see the factors influencing. This study was conducted at *Puskesmas* of East OKU regency by using primary data obtained from 3 resource persons and 5 respondents of the *Puskesmas* meanwhile the secondary data were obtained from library and archive studies. The data were then qualitatively analyzed.

The results showed that the government of East OKU regency had not had a special regency's or regent's regulation on Congenital Hypothyroid Screening. However, there were governmental supports to SHK program that were contained in other regulations such as Regional Regulation (*Perda*) of East OKU regency Nr. 6 of 2016 on Arrangement and Structure of Regency's Apparatus of East OKU regency and the Regent's Regulation Nr. 39 of 2016 on Position, Organizational Structure of Duties and Functions and the Working Procedures of the Regional Agencies. Besides, the government of East OKU regency would not complicate but it would even provide budget for UPTD of Health Office in running the health program. In running the program the Health Office would refer to the Health Minister's Regulation (*Permenkes*) Nr. 78 of 2014 on Congenital Hypothyroid Screening (SHK). So far, during this study was conducted, there was no a single baby having congenital hypothyroid. In accomplishing its duties the *Puskesmas* had implemented the Standard Operational Procedure (SOP) got from the Health Office of East OKU regency and the SOP itself was derived from Provincial Health Office.

Keywords: Government's Policy, the role of *Puskesmas*, Congenital Hypothyroid Screenin